

STUDI KOMPARATIF FRAGMENTATIF PROGRAM IDT DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI MIKRO KREDIT GRAMEEN BANK DI BANGLADESH

(Analisis Kritis dan Paradigmatik Pembangunan dalam Memarjinalkan Perempuan Serta Kajian Pemberdayaan Perempuan)

Ema Khotimah*

Abstrak

Pembangunan, idealnya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun yang terjadi, setelah bertahun-tahun pembangunan dijalankan, rakyat yang menderita kemiskinan masih saja dalam bilangan yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, pasca krisis moneter tahun 1997 akibat bertambahnya pengangguran, kemiskinan yang semula terdapat di daerah pedesaan, terjadi pula menimpa orang-orang perkotaan kondisi ini di perburuk dengan kenaikan BBM tahun 2005 lalu, yang menyebabkan penduduk yang terjadinya tidak miskin menjadi miskin, dan yang sudah miskin semakin miskin akibat semakin meningkatnya harga-harga dan kebutuhan hidup. Hasil penelitian berbagai kalangan, terutama kaum ekofiminesme menunjukkan bahwa, beban terberat akibat kemiskinan diderita kaum perempuan. Bila dalam pratik pembangunan kaum perempuan hanya ditempatkan sebagai obyek, maka saat oreantasi pembangunan diperbaharui pun, perempuan tetap saja termarjinalkan. DI indonesia misalnya perempuan miskin telah menjadi alat devisa negara melalui keberadaannya sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri meski tanpa skill yang memadai, juga tanpa ada jaminan hukum yang memadai.

Terhadap pratik dan paradigma pembangunan yang dilakukan negara-negara Duinia Ketiga, banyak ahli yang mengkritisi dengan kesimpulan bahwa telah terjadi kemiskinan struktural akibat kekeliruan kerangka paradigmatik konsep pembngunan Inilah yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan tidak juga menampakan hasil sesuai yang dihapkan. program IDT, raskin, P2KP, JPS, semuanya hanya pemecahan masalah kemiskinan bersipat sementara. sementara selain itu, program-

* **Ema Khotimah, Dra., S.Pdi., M.Si.**, adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

program yang diterapkan lebih banyak memihak kepada kepentingan pemegang kepentingan pemegang kebijakan.

Perguruan tinggi sebagai “Agent Of Chang” mengemban tugas dalam ikut serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Pemenang Nobel Perdamaian Dr . Muhammad Yunus dari Bangladesh melalui Grameen Bank yang didirikannya terbukti telah menjadi contoh kongrit peran perguruan tinggi khususnya kaum akademis nya dalam pengetasan kemiskinan. Yunus juga telah membuktikan bahwa kapitalisme pada saat yang bersamaan dapat digandengkan dengan sosialisme guna kpentingan rakyat miskin.

Kata Kunci : Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Krisis-krisis financial sangat mahal harganya bagi bangsa-bangsa yang mengalaminya. Amerika Serikat misalnya, telah kehilangan satu dasarwarsa kemajuan ekonomi dan sosial pasca krisis utang yang terjadi pada awal 1980-an World Bank (2001) juga mencatat Negara-negara Asia Timur kehilangan sekitar US \$500 milyar akibat krisis finansila yang sama. Meski berbagai komunitas finansial internasional telah memberikan bantuan finansial yang substansial melalui pinjaman penyelamatan multilateral dan bilateral kepada negara-negara yang terkena krisis pada tahun 1990-an. Pada kenyataannya hingga akhir 1999, negara-negara tersebut masih terpenuhi dalam krisis finansial yang sama.

Secara khusus, votatilitas pertumbuhan memiliki konsekuensi yang parah bagi kaum miskin, karena umumnya golongan ini kekurangan aset untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berlangsungnya kemerosotan ekonomi itu. Di Thailand misalnya, pada krisis ekonomi 1997, hanya dalam waktu satu tahun, pengangguran telahmeningkat dua kali lipat. Sementara itu, pada krisis yang bersamaan angka pengangguran di Korea meningkat tiga kali lipat sejalan dengan itu standar idup di kedua negara itumengalami penurunan sebesar 14 persen dan 22 persen. Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 25 persen dalam standar hidup (Stigelite dan Bhiatachanya dalam Thomas dkk 2001:149)

Levinsehn, Berry, el. Friedm (1999 dalam Thomas) mempelajari dampak kenaikan harga terhadap biaya rumah tangga miskin dan mukan bahwa di Indonesia, kaum miskinlah yang benar-benar paling terpuuk dibandingkan dengan kelompok lain karena, terjadi kenaikan dramatis dalam harga-harga bahan pokok, biaya hidup untuk mereka yang sepersepuluh berpendapatan paling miskin meningkat dari 130 persen setelah terjadinya krisis (2001:150)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah mengakibatkan jumlah masyarakat miskin meningkat drastis hingga mencapai, lebih dari 100 juta jiwa dari 27 juta sebelumnya (Forerester,2002:XIII). Bila pada era "pembangunan" Orde Baru, kemiskinan-kemiskinan selalu dikaitkan dengan masyarakat pedesaan. Pada masa krisis ekonmi 1997 justru kaum miskin perkotaan mengalami persoalan yang lebih berat, kelompok ini tidak mempunyai akses untuk mendapatkan lahan dan tidak memiliki rumah. Dengan demikian, sebagai akibat krisis tersebut, negara-negara Asia Timur mengalami pembalikan tajam dari pencapaian mereka sebelumnya dalam pengurangan kemiskinan.

Sebenarnya kemiskinan dan orang miskin merupakan teg telah diangkat dalam praktik maupun kerangka teoritis pembangunan. Demikian juga, keinginan menanggulangi kemiskinan sebenarnya bukanlah hal baru. Di Indonesia, misalnya :

dalam Program Pembangunan Jangka Panjang I, menjelang pelaksanaan Repelita III (1979/1980-1983/1984) pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu : (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian, pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dankesempatan memperoleh keadilan, tatkala itu disepakati kembali bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan), melainkan juga memenuhi kepuasan batiniah (seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan). Bahkan pada saat itu, juga ditegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan hendaknya merata keseluruh penjurur tanah air; bukan hanya dinikmati oleg segolongan

masyarakat dan dapat dirasakan oleh segenap anggota masyarakat (Sunyoto Usman,2006:130)

Spesifik untuk wilayah Jawa Barat misalnya, sekalipun telah dilakukan program pengentasan kemiskinan, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, saat ini untuk daerah, terdapat 2,9 juta rumah tangga miskin. Sementara itu, angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar antara 16% sampai 23.4%. Meski Tim Indonesia Bangkit memperkirakan angka tersebut mengalami kenaikan pasca kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 lalu.

Bagi kaum perempuan, menurut Menteri Negara Perberdayaan Perempuan Meuthia Hatta, kemiskinan menjadi beban tambahan, karena ia tidak saja harus menjaga dirinya tetapi juga harus menjaga kelanjutan hidup anak dan keluarganya (2006:1). Penyebab kemiskinan terutama di kalangan perempuan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya. "Secara kultural sebagian masyarakat masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya patriarki yang menimbulkan ketimpangan struktur sehingga perempuan menjadi terbatas untuk memperoleh pendidikan akses ekonomi dan berorganisasi (Hatta,2006:1) Hasil data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah perempuan usia sekolah yang memperoleh pendidikan lanjutan atas lebih kecil dibandingkan rekan laki-laki sebayanya. Dalam banyak kasus, anak perempuan terpaksa tidak bersekolah untuk mengurangi biaya pendidikan.

Sebenarnya, estimasi rendahnya posisi pendidikan perempuan sejak tahun 1985 sudah banyak dicermati oleh para ahli dalam bidang pendidikan. Salah satunya Santoso S. Hamijoyo menulis :

Data SUPAS 1985 antara lain menunjukkan bahwa lebih banyak wanita yang berpendidikan di bawah SD 6 tahun (62,7% dari populasi wanita) dibandingkan dengan kaum lelaki (50,6% dari populasi lelaki). Wanita berpendidikan di atas SMTA (Diploma, Akademi, P.T.) hanya 0,45% sedangkan lelaki 1,11%. Penduduk yang masih buta huruf ada disekitar 22 juta. Namun diantara penduduk wanita tercatat 25,72% yang buta huruf dibandingkan, lelaki 12,22% (dihitung dari masing-masing populasi) antara 1985 dan 1990 akan terjadi perubahan atau perbaikan tetapi usaha lima tahun tidak akan merubah situasi taraf pendidikan tersebut secara radikal (1990:33)

Ternyata memang benar, perubahan yang radikal belum juga dilakukan, sebab data terbaru Biro Statistik 2004 masih menggambarkan kaum perempuan masih menempati posisi rendah dalam perolehan akses pendidikan. Padahal menurut analisa Bank Dunia pada negara-negara berpendapatan menengah sebesar satu persen saja telah dapat menunjukkan pendapatan per kapita sebesar 0,3 persen ini berarti penting dalam menunjang terciptanya indikator-indikator peningkatan hasil-hasil pembangunan termasuk pengurangan angka kemiskinan.

Berdasarkan data terbaru BPS, tahun 2005 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 35,2 juta jiwa atau 15,8% dari total populasi penduduk. Maret 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75% dari total populasi. Kemiskinan terbesar berada di wilayah pedesaan dan sektor pertanian.

Krisis berkepanjangan semakin memicu menurunnya daya beli, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini berimplikasi terhadap pertumbuhan angkatan kerja yang semakin hari semakin meningkat, baik kuantitas maupun permasalahan. Pada tahun 2001, dari penduduk Provinsi Jawa Barat, jumlah anak yang berusia 1 – 19 tahun sebanyak 7.151.942 orang. Penelitian PKBI Jawa Barat di beberapa lokalisasi pelacuran di Bandung tahun 2003 menunjukkan bahwa 24% dari mereka memasuki dunia prostitusi ketika berusia anak.

Kemiskinan memang menjadi momok bagi Indonesia dan negara miskin berkembang lainnya. Itulah mengapa Indonesia menyatakan komitmennya bersama 189 pemimpin negara lain guna mengubah dunia menjadi lebih baik, dengan mendeklarasikan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Delapan poin MDGs adalah : (1) mengapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan dimana target untuk 2015 adalah mengurangi setengah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal dimana target 2015 adalah memastikan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan tahap pendidikan dasar (3) mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, dimana target 2015 adalah mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender pada semua tingkat (4) Meningkatkan kesehatan ibu dengan target 2015 adalah mengurangi ratio kematian ibu dalam proses melahirkan hingga 75%; (5) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; (6) menjamin keberlanjutan lingkungan serta

merehabilitasi sumber daya air yang hilang, dinama target 2015 jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum layak dikonsumsi berkurang setengahnya, (7) mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.

Kenyataan di kawasan Asia Pasifik hingga kini jutaan orang, sebagian besar anak tidak berpendidikan dan tidak memperoleh makanan secara tetap. Perempuan dan anak perempuan masih mengalami diskriminasi sebanyak 20 anak meninggal tiap menit karena kemiskinan dan penyakit yang bisa dicegah. Dua perempuan meninggal tiap jam akibat kehamilan atau melahirkan. Amrtya Sen menyebut, 100 juta perempuan 'hilang' akibat hal-hal seperti pembunuhan bayi perempuan, trafficking, pembunuhan, HIV/AIDS, dan wabah lainnya terus merebak. Lebih banyak orang 'hilang' akibat kelaparan dan penyakit, ketimbang konflik, peperangan dan bencana alam.

Tak heran baru-baru ini Indonesia dinyatakan termasuk di jajaran negara yang mundur dalam upaya MDGs Laporan "A Future Within Reach" ataupun laporan "MDGs Asia Pasifik 2006" menempatkan Indonesia dalam kategori terbanyak, dengan skor negatif, baik dalam indeks kemajuan maupun dalam status terakhirnya.

Kenyataan ini menunjukkan betapa perempuan dalam kancah pembangunan masih termarjinalkan, perempuan bahkan telah disebut-sebut pengamat dan ahli yang mengkritisi pembangunan sebagai korban bagi sebuah arena yang dinamakan "pembangunan". Pertanyaan kemudian adalah, mengapa berbagai program pembangunan ekonomi yang selama ini dicanangkan pemerintah belum juga mampu mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan kaum perempuan? Mengapa berbagai bantuan program dan dana yang dikucurkan pemerintah belum juga menyentuh kelompok miskin dan mengangkat mereka dari garis kemiskinan?

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu kepada beberapa permasalahan kemiskinan dan praktik pembangunan dalam kaitannya dengan kaum perempuan, maka tulisan ini memfokuskan diri dalam beberapa permasalahan spesifik berikut :

1. Bagaimana posisi perempuan dalam konteks paradigma Pembangunan klasik dan kritis ?

2. Hal-hal apa sajakah yang membedakan keberhasilan pengentasan kemiskinan di Bangladesh dan Indonesia sebagai sebuah studi komparatif fragmentatif?
3. Bagaimana posisi dan peran strategis Perguruan Tinggi dalam upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan kaum perempuan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Tulisan

Tulisan ini bertujuan untuk

1. Menganalisis krisis posisi perempuan dalam perspektif pembangunan klasik dan kritis yang telah dilaksanakan di negara-negara Dunia ketiga termasuk Indonesia.
2. Melalui studi komparatif Fragmentatif atas keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Bangladesh dan program yang diterapkan di Indonesia dalam menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan
3. Melakukan pemetaan berbagai peran dan posisi strategis kalangan Perguruan Tinggi dalam ikut serta mengentaskan kemiskinan, sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Menumbuhkan riset-riset tentang persoalan kemiskinan dan bagaimana perempuan menempati posisi strategis dalam membawa keluarga keluar dari garis kemiskinan.
2. Memberikan input bagi berbagai institusi yang terlibat dalam program pemberdayaan perempuan agar dapat belajar dari program pemberdayaan perempuan di Bangladesh dalam menerakan mikro ekonomi keluarga kaum miskin agar keluar dari garis kemiskinan.
3. Menstimulasi Perguruan Tinggi agar melakukan riset, pengabdian masyarakat dalam implementasi tri dharmanya terutama dalam peran sertanya membangun sumber daya manusia berkualitas khususnya kaum perempuan agar keluar dari garis kemiskinan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Pembangunan

Di dalam khazanah ilmu-ilmu sosial di Indonesia hingga tahun 1980-an, dikuasa oleh terori modernisasi. Selama lebih dari tiga dekade, teori modernisasi, yakni teori yang menyatakan bahwa kemiskinan suatu negara berpangkal pada persoalan internal negara bersangkutan. Sehingga slusnya adalah memodernkan negara tersebut telah menjadi pilihan utama untuk menjelaskan dan menyelenggarakan pembangunan negara. Sebagian besar kaum terdidik yang berpesan dalam wacana pembangunan di Indonesia adalah para lulusan Barat yang berkiblat pada paradigma modernisasi.

Kemudian dua ilmu sosial di Indonesia tiba-tiba dikejutkan oleh uraian Arief Budiman tentang "teori struktur" sebagai alternatif terhadap teori modernisasi. Menurut Budiman asumsi teori modernisme bahwa kemiskinan bersumber pada faktor-faktor internal suatu negara itu keliru. Sesungguhnya kekuatan-kekuatan luar telah menyebabkan suatu negara gagal dalam menjalankan pembangunannya. Dalam sebuah wawancara dengan redaktur Prisma (Juni 1983), Arief menyatakan bahwa ilmu sosial di Indonesia bersifat achistoris, karena ia mengabaikan konteks kesejarahan. Para ilmuwa sosial kita cenderung mengimport begitu saja teori-teori sosial dari Barat tanpa mempertanyakan keasahannya, terutapa ketika diterapkan dalam konteks lokal. Padahal, kata Arief Budiman "Ilmu-ilmu Sosial tidak bebas nilai" dan ilmu sosial itu sebenarnya merupakan satu ideologi imperialisme ekonomi" (2006:1)

Arief beranggapan bahwa paya pemberantasan kemiskinan dan pembangunan di Dunia ketiga tidak akan berhasil jika struktur hubungan antara negara-negara maju (Barat dan negara-negara miskin tidak diubah. Sebab struktur hubungan itu tidaklaj sejajar. Karena negara-negara maju bersifat hegemonik dan ekspleotatif terhadap mitra-mitranya yang lemah dalam hal ini adalah negara-negara Dunia Ketiga.

Pandangan Arief ini sejalan dengan perspektif Gramscian tentang Hegemoni. Di mata Gramsci (dalam Sugiono, 2006³¹), agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsesual.

Dalam perspektif pembangunan anasir kontrol dan kekuatan dalam program-program pembangunan sangat tampak sebagai praktik hegemoni. Saat mengadopsi teori modernisasi, maka yang ditawarkan program-program masyarakat "sedang berkembang" atau "tradisi oral" menuju sebuah masyarakat industri modern (Sugiono, 2006:89). Oleh karenanya, kaum Gramscian mengkritik perspektif ini sebab doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan tersebut menyediakan "etalase" yang memamerkan apa saja yang sudah dicapai rakyat di negara-negara maju dan memaksakannya sebagai inspirasi bagi rakyat miskin di negara-negara berkembang tentang apa yang dapat mereka capai.

Dalam keadaan seperti ini, teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan menciptakan definisi-definisi dan ukuran-ukuran tentang kemiskinan, kurang gizi, rendahnya harapan hidup, tingginya angka buta huruf. Memilih asumsi ini, doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan dalam pandangan Foucauldian dipandang sebagai perwujudan mekanisme kontrol dimana, teori dan doktrin itu diandaikan mengontrol atau mendisiplinkan mereka sesuai rumusan pihak yang hegemonik. Sebagai sebuah mekanisme kontrol dan disiplin, penerapan doktrin-doktrin dan teori-teori pembangunan tersebut keampuhannya. Tidak saja wacana hegemonik ini mampu menembus urusan ekonomi dan politik domestik negara berkembang tetapi lebih penting lagi mampu memasukkan negara-negara itu ke dalam sistem yang ada dan menjadikan mereka bisa diatur, jika bukan dikontrol.

Oleh karena itu, Arief Budiman dalam kritiknya terhadap teori modernisasi yang mengusung teori dan doktrin pembangunan yang hegemonik tersebut, beranggapan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan pembangunan di negara di dunia ketiga tidak akan berhasil jika struktur hubungan antara negara-negara maju (barat) dan negara-negara miskin tidak diubah.

Dalam berbagai tulisannya di beberapa harian nasional maupun jurnal Prisma, Arief Budiman menggunakan teori struktural untuk menjelaskan berbagai kegagalan pembangunan yang dijalankan pemerintahan Soeharto. Bersamaan dengan itu, ia gigih mengkampanyekan perlunya bersikap kritis akan peran ilmu-ilmu sosial. Kampanye ini mendapat tanggapan dari para sarjana dan intelektual terkemuka. Jika wacana ilmu sosial Indonesia kemudian terasa amat "kiri" (dalam artibersikap tajam terhadap teori modernisasi yang biasanya dianggap berada di "kanan"), maka orang yang paling bertanggung jawab adalah Arief Budiman.

Untuk mengokohkan pandangannya, Arief menerbitkan beberapa buku, yang mempermudah pembaca Indonesia memahami perdebatan seputar pembangunan negara. Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi (1997) merupakan bukunya yang jernih berbicara tentang teori negara. Teori Pembangunan Dunia Ketiga (1995) dan Negara dan Pembangunan (1991) adalah karya-karya lain yang mendiskusikan isu-isu fundamental tentang negara dan pembangunan. Ia ingin menekankan bahwa teori alternatif sudah saanya mendapat perhatian lebih besar dalam khazanah ilmu sosial di Indonesia.

Salah satu penjelasan favorit Arief adalah teori ketergantungan, yang merupakan varian dari teori struktural. Kendati berinduk pada teori struktural yang sangat Marxis, teori ketergantungan sebetulnya merupakan gabungan antara pandangan liberal dan sosialis. Inti teori ketergantungan adalah bahwa sebab utama kemiskinan dan kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga bukanlah keterlambatan dalam melakukan modernisasi, tapi campur tangan negara-negara kapitalis yang menghalangi perkembangan negara-negara itu. Pada dasarnya negara-negara Dunia Ketiga (yang biasa disebut "negara-negara pinggiran" dalam kapitalisme internasional) memiliki dinamika yang berbeda dari negara-negara Barat. Karena keunikan ini, maka pendekatan yang dipakai juga harus berbeda.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap negara-negara maju adalah faktor utama mengapa negara-negara pinggiran sulit berkembang. Pola hubungan yang tidak setara menciptakan kesenjangan yang terus melebar antara negara-negara kapitalis dan negara-negara miskin. Solusinya adalah memberikan kebebasan bagi negara-negara pinggiran itu untuk mengembangkan dirinya dengan melihat konteks budaya dan kesesjarahannya sendiri.

1.4.2 Kemiskinan

Meskipun kemiskinan sudah terlampaui seriang diulas dan dikaji oleh berbagai kalangan luas, namun masalah kemiskinan tetap saja aktual. Secara kasat mata, seorang awam pasti melihat kemiskinan sebagai segala sesuatu yang serba fisik, kualitas rumah dan segala perlengkapan rumah tangga yang lusuh dianggap simbol kemiskinan. Pakaian lusuh yang melekat pada tubuh seorang dinilai sebagai ciri kemiskinan. Jenis makanan dan frekuensi makan juga kerap dijadikan ukuran tingkat kemiskinan seseorang. Para ahli

kemudian menggunakan berbagai indikator untuk mengenali masalah kemiskinan dan selanjutnya menentukan garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang amat rumit. Langkah awal yang harus dilakukan dalam membahas masalah ini adalah dengan mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan cara dan has pengukuran yang berbeda. Selain itu faktor-faktor penyebab kemiskinan juga harus diidentifikasi apakah penyebabnya lebih bersifat kultural atau justru struktural. Setelah itu, barulah dapat ditentukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan itu.

Ada tiga jenis konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan ukuran yang konkret (*a fixed yardstick*). Ukuran ini berorientasi pada kebutuhan dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan) konsekuensinya adalah batasan kemiskinan absolut ini akan berbeda-beda sesuai batasan kemiskinan absolut yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Tentu saja konsep kemiskinan ini menuai berbagai kritik karena tidak mungkin membuat ukuran untuk seluruh anggota masyarakat.

Kedua, adalah konsep kemiskinan relatif, menurut Suryoto Usman, (2006:126), dirumuskan berdasarkan ide *of relative standard* yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Kemiskinan relatif diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep inipun menuai banyak kritik karena ukuran kelayakan ternyata bersifat cair dan relatif. Artinya, bagi suatu komunitas suatu standar hidup tertentu diapandang sebagai sesuatu yang layak, namun masyarakat di komunitas yang berbeda standar kelayakan tersebut dianggap tidak layak.

Konsep kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan subyektif dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri kelompok yang menurut ukuran tertentu dianggap berada di bawah garis kemiskinan, boleh jadi menganggap dirinya miskin, dan sebaliknya kelompok yang dalam ukuran tertentu dianggap tidak miskin, tetapi kelompok ini masih menganggap dirinya miskin. Sehingga, konsep kemiskinan yang ketiga inilah yang kemudian banyak diadopsi para penentu kebijakan persoalan kemiskinan dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Ada dua jenis perspektif yang lazim diuraikan untuk mendekati persoalan kemiskinan, yaitu perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural atau situasional (*Situasional perspective*). Perspektif kultural memandang kemiskinan dalam tiga tingkat analisis, individu, keluarga dan masyarakat. Secara individual kemiskinan ditandai oleh : sikap parakial, apatisme, fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan interior. Pada tingkat keluarga kemiskinan ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar. Pada tingkat masyarakat ditunjukkan oleh disintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat.

Perspektif struktural menilai kemiskinan sebagai dampak sistem ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan dalam konteks ini menurut Pronk (1993) dalam arti ekonomis timbul dan pembagian sumberdaya yang tidak seimbang, seperti modal dan tanah dan eksploitasi yang tidak cukup dari sumberdaya ini komponen sosial berhubungan dengan tidak cukupnya akses pada fasilitas pokok yang perlu untuk eksistensi terhormat. Namun demikian, Fran Seda (1992) justru mengategorikan kultur juga sebagai bagian dari kerangka struktural.

Kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), baik struktur, ekonomi, politik, sosial dan kultur. Kemiskinan buatan itu timbulnya dan dimantapkan pula : *by appeasement* sikap "nrimo/nasib; *by neglect* - tidak menghirarkikan ataupun anggap enteng, tidak urgen, malahan subversif. Sikap-sikap ini terdapat pula dalam masyarakat dan birokrasi kita (Seda, 1991:312).

Ibnu Khaldun dalam magnum opus nya *Al Muqadimah*, hampir membuat kesalahan fatal. Ia menulis bahwa kelaparan atau kemiskinan bisa melahirkan peradaban besar (dalam Misrawi 2005:1). Dengan mengambil contoh apa yang terjadi pada orang-orang Andalusia, Khaldun menggambarkan bahwa kendati mereka makan jagung dan buah jaitun, tidak memakan daging, roti, dan minyak samin sebagaimana halnya orang-orang Barat, tetapi bangsa Andalusia telah melahirkan peradaban yang tinggi. Namun demikian, tesis Khaldun ini terbantahkan, setelah kurang lebih delapan abad pemikiran tersebut menyebar ke seluruh dunia, yang terjadi justru sebaliknya bukannya membangun peradaban akan tetapi justru kemiskinan dan kelaparan menyisakan sejumlah masalah besar secara sosial seperti kekerasan dan keterbelakangan. Pada konteks tertentu bahkan kemiskinan menjadi sumber kebodohan dan radikalisme.

2 Pembahasan

2.1 Marginalisasi Perempuan dalam Konteks Pembangunan

Perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan karena kegagalan pembangunan (Simanjuntak, 2007:1). Sebab, semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan menurut Vandana Shiva (2005:83) bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu 'berpartisipasi' dalam pembangunan, melainkan akibat perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan. Ester Boserup (dalam Shiva:2005) telah mendokumentasikan bagaimana pemiskinan meminjam istilah Emha terhadap perempuan semakin meningkat setelah diterapkannya sistem kolonial. Pada era pembangunan yang pada gilirannya merupakan bentuk neo-kolonialisme, pembuat peraturan telah menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja, sehingga, pembangunan oleh kaum ekofenisme di anggap sebagai babak baru terhadap proses pemiskinan terutama bagi kaum perempuan. Proses-proses ekonomi dan politik yang menciptakan kemiskinan menyebabkan kaum perempuan paling dirugikan dalam proses pembangunan, misalnya saat terjadi privatisasi atas tanah, telah menyebabkan perempuan tercabuk hak-haknya untuk mengelola tanah.

Di Indonesia, saat industrialisasi diusung dan modernisasi diterapkan, kaum perempuan merupakan mesin "perahan" dalam proses produksi, melalui upah buruh yang sangat rendah. Saat Industrialisasi dimulai, kaum perempuan berduyun-duyun bekerja di pabrik ketika lahan pertanian diubah menjadi lahan industri. Ketika kemiskinan melanda, pada dekade berikutnya setelah dunia industri di Indonesia terkena krisis moneter, kaum perempuan Indonesia juga harus rela menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri meski tanpa skill yang memadai untuk menjadi tenaga kerja profesional, sehingga mereka saat bekerja di Timur Tengah maupun di Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei dan Singapura hanya mampu memasuki pasar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Selain itu, 'miskin'nya perlindungan hukum terhadap TKW di luar negeri, menyebabkan ribuan TKW kerap harus mengalami deportasi, sebagian mengalami kekerasan fisik dan psikis di tempat kerja. Setibanya di Tanah Air pun Kasus-kasus pemerasan terhadap perempuan yang menjadi TKW telah menjadi 'potret' yang memilukan bagi kaum perempuan Indonesia yang tertimpa proses pemiskinan sehingga mereka tergolong kaum miskin produksi yang sangat murah, maka pada saat industri terpuruk perempuan juga telah menjadi

mesin produksi yang sangat murah, maka pada saat industri terpuruk perempuan juga telah jadi alat devisa negara dengan keberadaan mereka menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Kemiskinan dalam konteks demikian “menyengsarakan” kaum perempuan, terlebih saat mereka dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik baik sebagai buruh pabrik atau TKW di luar negeri.

Ketika kebijakan kependudukan mengharuskan penurunan jumlah kelahiran dalam rangka mengurangi peledakan jumlah penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka negara-negara yang menerapkan program pembangunan serempak menerapkan Program Keluarga Berencana di India misalnya

Pada tahun 1951, dengan Rencana Pembangunan lima tahun yang pertama, India merupakan negara pertama yang menyusun sebuah kebijakan Nasional Pengendalian Penduduk bercirikan ‘top down’ kebijakan tersebut direncanakan di biayai dan diawasi secara terpusat, untuk dilakukan di tingkat pusat hingga lokal. Diarahkan, disusun dan dirancang oleh agen-agen eksternal kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah India dan para pejabatnya setelah kesalahan kampanye stereotip yang bersifat memaksa selama masa Darurat (1975-1977), tema program ini di ubah dari “keluarga berencana” menjadi “kesejahteraan keluarga,” namun strategi –strategi dan pendekatannya dalam menghargai perempuan tetap tidak berubah. Perempuan dipandang tolol, buta huruf dan bodoh, hanya menginginkan kelahiran anak-anak karenanya menghambat kesuburan mereka jelas sangat dibutuhkan (Vandara dan Mies, 2005)

Bagaimana dengan di Indonesia ? kasus serupa terjadi, saat paradigma pembangunan yang sama diterapkan. Program pencegahan ledakan jumlah penduduk melalui penekanan angka kelahiran telah menempatkan perempuan yang mengalami pemiskinan menjadi subordinat dan semakin termarginalkan dalam pembangunan. Atas nama mencegah ledakan penduduk dan upaya mengurangi kemiskinan lewat slogan “ keluarga kecil bahagia dan sejahtera “ telah memaksa perempuan menjadi obyek program tersebut. Di Indonesia, seperti halnya di India juga, perempuan melalui program KB telah mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, serta struktural melalui keharusan penggunaan alat kontrasepsi. Melalui penelitian

panjang Rosalian Sciortino, atas program KB di Indonesia berkesimpulan bahwa :

Dalam mengimpletasikan program KB, kesempatan perempuan untuk mengontrol kesehatan dirinya sangat terbatas Mereka tidak dapat memilih metode kontrasepsi yang berbeda dari yang ditawarkan karena tidak tersedia. Mereka juga hampir tidak mendapatkan informasi mengenai baik- buruknya setiap metode kontrasepsi. Apalagi, sekalipun informasi yang diberkan lebih mengutamakan kepentingan pencapaian target kebijakan dari pada memenuhi kebutuhan perempuan (1999: 156)

Kaum perempuan miskin juga saat program KB dilancarkan tidak memiliki kesempatan mengubah alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan mereka. Dengan kata lain menurut Sciorto, ” para akseptor tidak dihargai sebagai mitra di dalam mengurangi jumlah kelahiran anak, akan tetapi hanya dipandang sebagai objek “ (1999:157).

Selama rentang waktu tersebut, kaum perempuan telah banyak menderita misalnya di Bangladesh dan India, Wanita-wanita yang menjalani operasi sterilisasi bahkan tidak dibius terlebih dahulu. Perempuan menderita sakit bukan lantaran kesuburan mereka, mereka jatuh sakit karena mempertahankan kesuburan dengan menggunakan kontrasepsi. Telah diketahui, bahwa kemandulan yang banyak dikeluhkan dewasa ini merupakan bagian dari metode kontrasepsi yang merusak, “ contohnya penggunaan Dalkon Shileld dan berbagai pemakaian IUD lainnya dan pengobatan dokter tanpa perasaan (Shiva san Mies, 2005 : 216)

Strategi program KB guna memerangi kesuburan kaum perempuan miskin di negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia telah mengabaikan efek jangka panjang terhadap kesehatan perempuan. Perempuan miskin tidak diperlakukan sebagai manusia, namun hanya sebagai entitas angka statistik kependudukan di dalam pembangunan. Dalam Program KB, pemerintah telah menjadi agen-agen bagi negara donatur untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah penduduk. juga pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan guna memenuhi target tersebut melalui petugas-petugas lapangan yang siap memaksa perempuan miskin untuk bersedia dipasangkan IUD, sterilisasi dan meminum obat-obatan yang menghambat kesuburan. Perempuan di Dunia Ketiga juga telah menjadi apa yang disebut shiva dan Mies sebagai ”kelinci percobaan” oleh industri obat-obatan multinasional dalam melanggengkan dominasi ekonomi mereka

melalui proyek pembantasan jumlah kelahiran di berbagai negara Dunia Ketiga.

Inilah bukti kongrit praktik hegomoni negara-negara maju atas negara negara Dunia Ketiga. Negara maju sebagai donatur pembangunan, tidak hanya menciptakan ketergantungan secara ekonomi pada negara Dunia Ketiga, tetapi juga sekaligus melakukan kontrol atas praktik pembangunan melalui regulasi dan penciptaan berbagai produk program yang harus dilaksanakan oleh Dunia Ketiga. Inilah yang dikritik oleh kaum Gramscian, karena dalam kondisi seperti ini telah terjadi praktik hegomoni dan dominasi atas Negara-negara Dunia Ketiga oleh negara-negara maju.

Bila dalam program sepuluh tahunan PBB di bidang perempuan beranggapan bahwa kemajuan posisi ekonomi kaum perempuan akan mengalir secara otomatis seiring terjadinya perluasan dan penyebaran proses pembangunan. Namun kenyataannya sebaliknya, pembangunan itu sendirilah menurut kaum ekofenisme yang menjadi sumber masalah, khususnya dalam memarjinalkan kaum perempuan. Paradoks dan krisis pembangunan yang dihasilkan dari kesalahan mengidentifikasi secara budaya yang melihat kemiskinan sebagai kemiskinan secara rill. Dalam kenyataannya, eksploitasi sumber daya alam dalam proses pembangunan justru menyebabkan kaum perempuan kehilangan basis ekonomi mereka yang utama sehingga mereka telah mengalami proses pemiskinan secara struktural.

2.2 Kemiskinan dan tinjauan kritis program IDT

Adanya kesadaran berbagai pihak untuk ikut serta dalam memberikan andil dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak perlu disangsikan lagi. Pemerintah selama beberapa tahun telah menerapkan konsep pengentasan kemiskinan salah satunya melalui program IDT. berikutnya, melalui pendekatan pembangunan Keluarga sejahtera, pemerintah pun memberikan modal usaha **KUKERSA** kepada para keluarga Pra- Sejahtera dan Sejahtera –I Mengingat karena keterbatasan dana, bahkan pemerintah alam beberapa program tersebut menghimbau agar para pengusaha menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung program itu. Pasca Repormasi program RASKIN (Beras untuk kaum miskin) misalnya, sama seperti halnya progam-program pembangunan sebelumnya masih program-program inipun masih menjadi jawaban persial atas persoalan kemiskinan dalam hal ini, yang di berikan oleh program

pemerintah bukannya berupa “kail“, tetapi “ikan” yang siap disantap oleh rakyat miskin. sehingga dengan bantuan ini membuat sebagian besar rakyat miskin. sehingga dengan bantuan ini membuat sebagian besar rakyat miskin di Indonesia terbiasa menunggu santunan pemerintah, bukannya menciptakan dan memproduksi. sesuatu yang akan membantu perekonomian diri sendiri dalam jangka panjang.

Jika pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagi jembatan bagi konsep–konsep pembangunan makro dan mikro (Kartasmita dalam Sarman, 1997 ; 37) Maka, dalam kerangka pemikiran ini, berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai “rangangan” guna memacu kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud oleh Kartasmita itu terefleksikan dalam program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dirancangan oleh Bappenas.

Menurut Buku Panduan Program IDT, program ini mengandung 3 pengertian dasar, yaitu (1) sebagai pemicu gerakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai strategi dalam pemerataan dan penajaman program pembangunan, dan (3) adanya bantuan dana bergulir bagi masyarakat yang paling memerlukan (Sarman, 1997) Untuk rumusan konsep tentu tidak diragukan lagi gagasan yang demikian konstrutif ini. Namun demikian, ada dua hal yang menyebabkan program ini pada akhirnya tidak dapat menanggulangi kemiskinan dalam jangka panjang Para pengamat menyebutnya sebagai “keracunan” laten pada program ini. Pertama, tentang pemilihan desa miskin (“tertinggal“) sebagai “lokus sasaran IDT. kedua, tentang bantuan dana bergulir yang dijadikan kiat khusus dalam program ini.

Apabila disimak kembali gagasan awal IDT sebagai pemicu dan pemacu gerakan PKK agar menjadi sebuah gerakan nasioanal yang melibatkan segenap lapisan masyarakat Indonesia, tentulah fakta-fakta di lapangan yang agak ”negatif” tidak boleh diabaikan, Catatan kritis dari Mukhtar Saman melalui penelitiannya di berbagai daerah yang menerima program IDT adalah ”paling tidak terlalu sedikit contoh kasus keberhasilan program itu yang secara faktual menunjukkan betapa warga miskin (yang menerima bantuan dana) telah menjadi sejahtera karena kontribusi tunggal program IDT dibandingkan dengan contoh kasus bahwa penerima dana program IDT ternyata mangkir menggulirkan dana yang diterimanya.(1997:42)

Meskipun upaya mengatasi kemiskinan telah ditempuh melalui berbagai program baik IDT, Jaring Pengaman Sosial, lalu selanjutnya adalah Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan "Masyarakat yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan, tetap saja tidak beranjak dari kemiskinannya."(Abu Hurairah, 2006: 1)

Hingga kini kemiskinan masih menjadi persoalan terbesar bangsa ini. jika pada masa Orde baru peralihan lahan pertanian kegiatan non pertanian telah menyebabkan jutaan orang kehilangan gantungan hidupnya, sehingga tanpa disadari telah memiskinkan masyarakat desa. Sektor industri yang diharapkan mampu lebih berperan dalam meningkatkan derajat hidup rakyat ternyata belum mampu menampung serbuan tenaga kerja yang sebelumnya berkualifikasi petani Pada pasca reformasi, keadaannya lebih parah lagi, saat industri mengalami krisis, maka bukan hanya wilayah pedesaan yang mengalami kemiskinan, masyarakat urban di perkotaan pun telah memasuki fase kemiskinan yang sama.

Penanggulan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain berorientasi pada aspek ekonomi dari pada aspek multidimensional Penanggulungan kemiskinan dengan fokus ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi sebagai persoalan kemiskinan yang sebenarnya. dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidak berdayaan, dsb Sementara dalam konteks dimensi struktural atau mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya mengalami kemiskinan struktural dan politis.

Kedua, lebih bernuansa karikatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas, penanggulungan kemiskinan yang karikatif, tidak akan muncul dorongan dari masyarakat. miskin sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulan diarahkan supaya mereka menjadi produktif.

Ketiga, memosisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek, seharusnya, mereka dijadikan sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulungan kemiskinan.

Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada sebagai fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan pemerintah sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Sebagaimana semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki mengatakan bahwa paradigma baru menekankan “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki kaum miskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta sebagai strategi penanggulangan yang telah dijalankan secara lokal.

Akibat kekeliruan paradigmatis dalam penanggulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan.

Pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya memperioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain, pemecahan kebutuhan mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan harus mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan memborong produktivitas, strategi yang di pilih adalah peningkatan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (net working), serta informasi pasar.

Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.

Keempat, strategi pemberdayaan kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

2.3 Kredit Mikro Ala Grameen Bank Contoh Keberhasilan Pemberdayaan Kaum Perempuan

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2005, kemiskinan di Indonesia tidak saja semakin meningkat tajam melainkan juga bersifat masif. Sedikitnya, sekitar satu juta buruh kehilangan pekerjaan, pengangguran makin bertambah. Pasca kenaikan BBM 2005 bantuan langsung tunai (BLT) 100.000 per bulan sebagai kompensasi sungguh tidak memadai untuk menopang keterpurukan kaum miskin Sementara itu pada saat yang bersamaan anggota DPR akan mendapat kenaikan gaji sebesar 50 juta.

Fakta ini menunjukkan bahwa melalui regulasi pemerintah rakyat dipaksa menjadi miskin. Jika dalam praktik pembangunan di masa lalu industrialisasi dan modernisasi rakyat dipaksa miskin, maka tahun 2005 rakyat dipaksa menjadi miskin, oleh sistem ekonomi dan politik kekinian. Sedangkan pemerintah dan elite politik di saat yang sama mengalami kenaikan tingkat kemakmuran, melalui gaji dan proyek-proyek dalam kaitan dengan jabatan mereka, kemiskinan adalah proses pemiskinan yang dilakukan elite politik dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan politik yang merugikan rakyat kecil.

Karena itu, kondisi ini sejalan dengan pandangan kaum strukturalis, termasuk pendukung Gramscian, bahwa masalah kemiskinan di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah "masalah kemiskinan struktural, seperti akses sumber daya, relasi kekuasaan antara rakyat dan negara, serta pemerintah dengan kreditor" (Buchori dan Sahepi dalam Misrawi 2005 :2)

Saat seperti inilah, masalah kemiskinan bergeser pada masalah pemiskinan, kemiskinan bukan produk yang tiba-tiba muncul, akan tetapi akibat dimisasi dan penindasan sehingga rakyat kecil mengalami pemiskinan, kuasa yang menurut Gramsci melakukan marjinalisasi sehingga rakyat yang mengalami pemiskinan dimarjinalkan oleh kuasa moral dan modal yang datang dari luar kehendaknya dan menetapkan mereka pada garis kemiskinan. Disinilah, program Mileneum Development Goals (MDGs) sebagaimana digagas PBB harus diimplementasikan oleh pemerintah dan elite politik agar pemimpin bangsa ini lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan politik.

Jika tudingan berbagai kalangan yang mengkritisi proses marjinalisasi perempuan dalam pembangunan penyebabnya adalah faktor struktural, maka

jawaban–jawaban atas persoalan kemiskinan pun harus mengandung dimensi struktur, baik itu struktur ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.

Inilah contoh keberhasilan perbaikan struktural ekonomi dan sosial dan budaya pada tataran dan mikrokopis. Berbekal keyakinan bahwa, “kemiskinan“ tercipta karena sistem, kita membangun kerangka teori berbasis sebuah asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, kemiskinan lebih disebabkan oleh kekeliruan pada level konseptual, daripada kurangnya kemampuan orang yang berada pada kemiskinan itu” (Muhamamad Yunus Dalam Nesia, 2007:1) Yunus dalam hal ini mengecah konsep bisnis kapitalis, dan menjebak manusia pada krisis monodimensial yang berorientasi semata-mata memperoleh profit. Pengusaha apalagi karyawan telah dibentuk oleh kapitalisme sebagai mesin pencetak uang. Atas dasar pemikiran itulah kemudian Yunus pada program memecahkan masalah kemiskinan di Bangladesh. “membumikan“ kapitalisme dengan menggandengkan dengan sosialisme. sebab kemiskinan selalu ditegaskan oleh Yunus diciptakan oleh sistem alias bersifat Struktural.

Today, Grameen Bank gives loans nearly 7.0 million poor people 97 percent of whom are women, in 73,000 villages in Bangladesh. Grameen Bank gives collateral – free income generating, huosing, student and micro enterprise loans to the poor families and offers a host attractive saving, pension funds and insurance product for its members. Since it introduced them in 1984, housing loans have been used to construct 640.000 houses the legal ownership of the house belong to womwn themselves. We focused on woman because we found giving loans to woman always brought more benefits to the family In a accumulative way the bank has given out loans tataling about \$ 6.0 bilion The repayment rate is 99 % Gramen Bank today amount to 143 percent of outsatnding loans. According toGrameen Bank as internal survey, 58 percent of our borrowers have crossed the proverty line (2006)

Inilah sepenggal fakta yang disampaikan Muhammad Yunus saat menerima anugrah Nobel Perdamaian di Oslo Norwegia pada tanggal 10 Desember 2006.

Yunus dengan Grameen Bank nya telah menciptakan Bank yang ramah terhadap kebutuhan rakyat kecil. Bukan hanya kreditor saja yang dibantunya, tetapi juga Grameen Bank melakukan inovasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan

16 butir kesepakatan perjanjian kepada pihak peminjam, beberapa diantaranya adalah : bahwa mereka akan mendukung anaknya bersekolah, mengkonsumsi sayuran berwarna untuk mengatasi kekurangan vitamin A yang menyebabkan tingginya angka rabun senja di kalangan anak-anak Yunus juga membangun kerjasama dengan kalangan profesional dalam bidang kesehatan untuk membuat pos-pos bagi ibu hamil agar memudahkan mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan terutama dalam memperoleh informasi kesehatan reproduksi. Dalam hal pemberdayaan bidang kesehatan ini juga, Yunus bekerjasama dengan para peneliti di bidang kesehatan dan pertanian agar dapat menyediakan benih sayuran yang menghasilkan vit A, Benih-benih ini kemudian dijual kepada kaum miskin melalui jaringan Grameen Bank dengan harga yang sangat inilah grafik yang bersipat eksponensial dalam pertumbuhan jumlah pengguna jasa Grameen Bank yang 97 persennya terdiri dari kaum perempuan.

Dalam bidang pendidikan, selain keharusan bagi kaum wanita yang menjadi kreditor untuk mendorong anak-anaknya sekolah. Grameen Bank juga telah memberikan 30.000 beasiswa setiap tahun sepanjang 30 tahun kehadirannya di kalangan kaum miskin di Bangladesh. Inilah upaya Yunus memperbaiki sebuah generasi baru dari kaum miskin itu untuk berdaya dan cerdas. Beberapa orang dari anak asuh Gramen Bank bahkan sudah ada yang bergelar Ph.d. ada 13.000 siswa yang memperoleh pinjaman tanpa bunga dan agunan untuk biaya pendidikannya. Setiap tahunnya Setiap tahunnya lebih dari 7000 siswa. Inilah upaya yang disebut Yunus sebagai upaya menghancurkan siklus sejarah kemiskinan.

Selain membangun ketahanan ekonomi rakyat kecil, melalui program nya juga yunus telah menciptakan sistem teknologi informasi bagi kaum miskin untuk kemudahan akses mereka. Sejumlah perusahaan industri “digandeng nya” agar dapat menyerap hasil produksi para kreditor Grameen Bank. Bank Grameen telah menjadi bukti menggandengkan kapitalisme dan sosialisme bagi kepentingan rakyat kecil. Juga darinya dihasilkan “*social stock market*” bagi para investor yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan Bank Grameen yang diprakarsai Yunus yang berlatar belakang ekonom dan dosen ini, tidak saja menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukanlah sebuah utopia. Kemiskinan dapat secara perlahan-lahan dihapuskan melalui kontruksi kapitalisme–sosialisme Di situlah kehebatannya, dia bisa menyalurkan energi negatif kapitalisme dalam tubuh bank, kemudian mengubahnya menjadi energi positif Ia mengambil kemegahan bank lalu memberikannya kepada yang juga berhak yaitu kaum miskin

Bangsa Indonesia, nampaknya harus belajar banyak dari keberhasilan Dr.Muhammad Yunus, betapa kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Khususnya perguruan tinggi, tempat dimana para peneliti dan kaum intelektual berada, kiranya bertanggung jawab dalam mengemban amanah upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

3 Kesimpulan Dan Saran

3.1 Kesimpulan

- 1) Perempuan dalam konteks pembangunan telah mengalami marginalisasi. kaum perempuan melalui paradigma pembangunan yang mengunggulkan modernisasi telah ditempatkan sebagai obyek pembangunan bukan lagi subjek yang memiliki akses dan dapat berperan serta dalam menentukan kehidupannya sendiri. Pembangunan dengan paradigma modernisasi yang mengunggulkan program-program yang notabene bersifat “top down“, telah menjadikan kaum perempuan mengalami proses pemiskinan secara struktural
- 2) Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah sejak zaman Orde Baru belum menampakkan hasil yang memadai dalam membantu mengurangi angka kemiskinan. Program IDT, JPS, dan Raskin misalnya selain terlampaui birokratis, juga pemerintah seakan-akan melulu hanya memberikan ikan kepada rakyat miskin, bukan kail yang akan membuat mereka berusaha atas upaya mereka sendiri untuk keluar dari garis kemiskinan.
- 3) Kemiskinan adalah tanggungjawab semua pihak. Melalui program kredit mikro dari Grameen Bank rakyat Bangladesh sekitar 7 juta orang telah memperoleh bantuan, dan 50 % diantaranya telah benar-benar ke luar dari garis kemiskinan. Muhammad Yunus, telah menjadi contoh bagaimana mengatasi kemiskinan bukan hanya pada tataran teoritis, tetapi terimplementasi pada tataran praksis. Yunus juga telah menyakinkan Dunia bahwa kemiskinan bukanlah suatu yang mutahil dihapuskan, dan dia telah membutikannya.

3.1 Saran

- 1) Karena perempuan telah menjadi “korban“ pembangunan, perlu studi-studi dan upaya pemberdayaan perempuan dalam kerangka yang lebih humanis dan demokratis agar perempuan dapat menjadi subjek dan berdaya secara ekonomi dan politik dalam memperoleh akses.
- 2) Karena kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh kekeliruan paradigmatis. Oleh karena itu, perlu orientasi baru dalam mendekati masalah kemiskinan ini secara multidimensial.

- 3) Karena Grameen Bank telah membuktikan keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan secara holistik dengan juga melibatkan para peneliti dari berbagai perguruan tinggi untuk secara aktif berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan Di Indonesia sendiri, tidak ada salahnya mencontoh program yang diterapkan oleh Muhammad Yunus dalam mengatasi kemiskinan. Saat ini Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi sudah seharusnya turut serta dalam program pengentasan kemiskinan, melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka paradigmatik baru, yaitu program yang di dasarkan atas kepentingan kaum miskin dan bukan program pesanan. Selain itu juga melalui berbagai Fakultas dan disiplin ilmu yang berbeda, Unisba sudah saatnya turut serta aktif dalam menguatkan ekonomi rakyat dan pengabdian dan mengembangkan sistem ekonomi mikro berbasis keryakyatan melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akademisi di fakultas ekonomi dan syariah. Fakultas-fakultas lainya dapat melakukan rekayasa sosial dan teknologi kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Anzar Simanjuntak Heni, 2007, *Perempuan Kemiskinan dan Pembangunan*.
<http://dahnilanjarsimanjuntak.blogspot.com/2007/08/perempuan-kemiskinandanperempuan.html>.
- Budiman Arief, freedom institut center For democracy, nations and market economy studies <http://www.freedominstitute.org/id/index>
- Hatta. Meutia. 2006 : Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Rendah ”*Sambutan* tertulis pada pengukuhan Lembaga Pemberdayaan, Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Hamijoyo. Santoso S., 1990. "Lima Jurus Strategi : Dasar Pendidikan, dalam Era Globalisasi", dalam *Jurnal pendidikan*, Mimbar Pendidikan No. 4 tahun IX, 1990. Bandung, University Press IKIP.
- Huraerah, Abu. 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pikiran Rakyat online, edisi Senin 02 Januari 2006.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. Tidak Sekedar Kemiskinan tetapi Pemiskinan, Kompas online, Senin, 24 Oktober 2005.
- Neisia. 2007. Kami Miskin Bukan Karena Malasa.... Menggugat Kapitalisme, Jurnal Online.
- Pronk J.P. 1983. Sedunia Perbedaan : *Sebuah Acuan Baru Dalam Kerjasama Pembangunan Tahun 1990-1n*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Seda, Frans. 1992. *Simponi Tanpa Henti : Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta, Gramedia.
- Sarman, Muhtar. 1997. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Jurnal Prisme No. 1 tahun XXVI Januari 1997. Jakarta. LP3ES.
- Thomas, Vinod dkk. 2001, "*The Quality of Growth : Kualitas Pertumbuhan*, Jakarta Gramedia.
- Turmudzi, Didi. 2005. Perguruan Tinggi dan Peradaban. Pikiran Rakyat Online Rabu. 20 Juli 2005.
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yunus, Muhamamd. 2006. Nobel Lecture.[http. Noberprize.org./nobel.Prizes/Launreates/2006/Yunus-lecture-en.html](http://Nobelprize.org/nobel.Prizes/Launreates/2006/Yunus-lecture-en.html).